

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Zulkarnaini dan Dadang Mashur

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Community Empowerment in the Utilization of Village Funds through Institutional Strengthening. Until now there are still many problems in rural development in Indonesia that need to find a solution. One of the government's efforts to accelerate village development is by rolling out the Village Fund Allocation Program (ADD) to realize the administration and implementation of aspirative and participatory village development. In Siak District, the ADD program has been held since 2007, but until now its implementation has not been optimal yet. This study aims to determine how the empowerment of community in the utilization of ADD through institutional strengthening District Apit Sungai Siak District and what factors affect the effort of empowerment. This research is a descriptive qualitative research with sampling technique used is snowball sampling. The research informants were the officials involved in the ADD program and the community leaders who knew the program. Data collection was done by interview and observation technique, after the data collected and then analyzed by using qualitative descriptive analysis. The results show that community empowerment through ADD Program in Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency has not been running well. Many of these programs are diverted to village infrastructure development programs rather than community empowerment activities. The dominant factor influencing the mismatch of community empowerment is the fear of failure resulting from the inability of the community to join the ADD program that provides business capital assistance for the needy.

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Melalui Penguatan Kelembagaan. Sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan desa di Indonesia yang perlu dicarikan solusinya. Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa adalah dengan menggulirkan Program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Di Kabupaten Siak, program ADD sudah diselenggarakan sejak tahun 2007, namun hingga kini pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD melalui penguatan kelembagaan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya pemberdayaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*. Informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program ADD dan tokoh masyarakat yang mengetahui program tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program ADD di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Banyak dari program ini yang dialihkan kepada program pembangunan infrastruktur desa dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Faktor yang dominan mempengaruhi ketidaksesuaian pemberdayaan masyarakat ini adalah ketakutan (*fear*) akibat dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengikuti program ADD yang memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, program ADD, kelembagaan desa

PENDAHULUAN

Aspek pembiayaan merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa. Tersedianya dana yang cukup adalah konsekuensi logis dari pemberian kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” indetik dengan “*automoney*” (Wassistiono, 2007). Artinya adalah untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya

Pembiayaan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itu pemerintah pusat telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah

untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam upaya melaksanakan amanah peraturan pemerintah tersebut, untuk memberikan bantuan pembangunan desa yang merupakan hak desa dalam upayanya melaksanakan otonomi desa (Wirutomo, dkk., 2003).

Program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif, sedangkan tujuannya merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan. Program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat, yang memiliki arti penting mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Siak sudah menyalurkan Program ADD ini kepada semua desa melalui kecamatan sejak tahun 2007. Bentuk penyalurannya berupa tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa (TPAPD), penunjang kegiatan pemerintahan kelurahan/desa (PKPKD), dan pembangunan infrastruktur desa (PID). Lembaga lokal di tingkat desa yang merupakan pelaksana program ADD adalah kantor desa yang kemudian akan dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya. Besarnya dana ADD yang diterima oleh kecamatan disesuaikan dengan jumlah kelurahan atau desa yang dimiliki oleh kecamatan yang bersangkutan.

Ternyata pemanfaatan program ADD ini banyak menemui kendala. Hasil temuan Effendi (2009) di Desa Jatipuro Kabupaten Karangayar Jawa Tengah menyebutkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam

pemanfaatan ADD. Hal ini disebabkan karena adanya masalah saat aparat pemerintah desa tidak memberikan solusi yang tepat ketika ada usulan pembangunan yang menjadi prioritas yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Selain daripada itu, dengan dicairkannya dana ADD pada bulan November dapat menimbulkan masalah dimana pada bulan tersebut masyarakat mulai bercocok tanam justru harus menyelesaikan pembangunan yang direncanakannya. Masalah lain yang ditemukan adalah, dalam penggunaan ADD sebesar 70% ternyata dipergunakan hanya mencakup belanja pembangunan fisik saja. Padahal semestinya dana 70% tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup belanja fisik dan belanja non fisik.

Di Kabupaten Siak penyaluran program ADD juga tidak luput dari masalah. Terutama pada penyaluran dana PID pada beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Sungai Apit adalah kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelola dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagai konsekuensinya pada tahap berikutnya penyaluran dana PID di ketiga kecamatan tersebut tidak dilakukan, sebab pemberdayaan masyarakat desa merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengembangkan dirinya. Pada program ADD yang berhubungan dengan PID, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan, kemauan dan keinginan untuk memberikan ide/gagasannya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Namun realitanya berbeda, dimana pemberdayaan masyarakat desa melalui aspirasi akan program ADD tidak berjalan.

Ketidaksiapan administrasi dan pelaporan pada kecamatan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan ADD. Padahal penggunaan bantuan ADD seharusnya dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat

Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan lain dalam pemanfaatan program ADD di Kecamatan Sungai Apit ini adalah tidak dilibatkannya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan ADD di bidang PID lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan langsung ADD tahap II. Kondisi ini juga didukung oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana program ADD yang sudah ditunjuk dan ditetapkan.

Selanjutnya yang menjadi sorotan dalam pemanfaatan ADD ini adalah masih rendahnya partisipasi swadaya masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai menunjukkan kurangnya koordinasi dari organisasi pengelola dengan masyarakat. Dimana dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi tidak tahu besarnya bantuan yang diterima, tidak dapat menyalurkan aspirasinya, dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD melalui penguatan kelembagaan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah yang diteliti. Alasan pemilihan metode kualitatif ini adalah

keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung serta melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil, guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Metode kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002). Pendekatan kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi atau perangkat proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional. Tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik *snowball sampling* yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang menggelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan. Setelah data terkumpul dari setiap infoman penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan desa secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran dari pemberian ADD adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. ADD diperuntukan membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan: 1) pemberdayaan kelembagaan desa, 2) pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa, serta 3) pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan.

Potensi ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Apit tidak jauh berbeda seperti pada mayoritas kecamatan lainnya di Kabupaten Siak. Kegiatan ekonomi terbesar masyarakat terdapat pada sektor pertanian, yaitu pertanian dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Sumbangan produksi pertanian dan perkebunan kelapa

sawit dan keret merupakan yang terbesar dan paling menonjol. Perkebunan sawit dan karet yang dimiliki oleh masyarakat sangat membantu penyediaan bahan pakan ternak yang dimiliki. Kemudian potensi ekonomi masyarakat yang lainnya berasal dari tanaman bahan makanan. Produksi tanaman bahan makanan yang dihasilkan adalah sagu, nenas dan kopi, sedangkan untuk tanaman sayur-mayur yang paling banyak ditanam masyarakat adalah kacang panjang.

Program ADD di Kabupaten Siak menggunakan anggaran yang cukup besar. Tahun 2016 saja dikurangkan anggaran dengan total sebesar Rp197 miliar untuk 131 desa se-Kabupaten Siak. Rincian dana yang akan diterima dan dikelola Pemerintah Desa (Pemdes), yakni dari Pemerintah Pusat sebesar Rp77 miliar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sebesar Rp120 miliar. Dana tersebut tersebar untuk 12 kecamatan dimana desa yang terbesar menerima ADD adalah Desa Perawang Barat di Kecamatan Tualang.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan ADD Melalui Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Karenanya para ahli menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai tujuan. Dimana dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mengeluarkan diri dari ketidakberdayaan yang dialaminya.

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini memfokuskan pembahasan berdasarkan teori Sumaryadi (2005) yang menjelaskan tentang kriteria pemberdayaan masyarakat, yakni kepemimpinan, inovasi, kepercayaan, *team work*, dan komunikasi. Kesemua kriteria ini akan dilihat berdasarkan pada program ADD yang memang diperuntukan membiayai sebagian program pemerintahan desa.

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan dalam mengelola kegiatan agar terlaksana sesuai tujuan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para ketua pelaksana program ADD di Kecamatan Sungai Apit sebenarnya sudah cukup baik. Dimana dalam melaksanakan aspek kepemimpinan ini, para ketua pelaksana program ADD mampu mengkomunikasikan program kepada setiap masyarakat melalui pengumuman, himbauan dan sosialisasi yang dilakukan setiap waktu. Kemampuan ini tentunya tidak terlepas dari *intelegency* yang dimiliki oleh ketua program ADD, karena *intelegency* yang dimiliki oleh pimpinan akan menjadi penentu dalam proses pelaksanaan program yang dikerjakan.

Intelegency pimpinan tidak hanya ditinjau dari pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan saja, namun juga dilihat dari pengalaman yang dimilikinya. Realitas yang ditemukan bahwa tidak semua ketua pelaksana program ADD memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sebagai ukuran untuk *intelegency* yang dimiliki. Sebab, tidak sedikit dari Ketua Program ADD ini yang memiliki pendidikan rendah (tamat SMA), namun dapat sukses melaksanakan program ini dengan pengalaman yang dimilikinya. Akan tetapi banyak ditemukan kegagalan dari program ini karena kekurangan pengetahuan dari pemimpin yang ada.

Contohnya saja dalam masalah pencarian dana. Sebelum melakukan pencairan, tentunya setiap desa harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Misalnya dengan menyiapkan seluruh administrasi yang sudah ditentukan yang harus dipenuhi dulu seperti adanya nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Selain itu, berkas-berkas tersebut juga harus melalui proses verifikasi administrasi. Baru setelah itu dapat dinaikkan ke Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di kabupaten untuk permohonan pencairan terhadap dana ADD tersebut.

Pemerintah desa sebagai pengelola sekaligus pelaksana ADD banyak yang belum paham dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 ayat 1 menekankan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nyatanya pemerintah desa sebagai kepemimpinan formal tidak pernah melibatkan masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai. Indikasi ini diperkuat dengan kasus dipanggilnya lebih dari 30 kepala desa dan 12 camat oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak terkait dugaan *mark up* dan penyelewengan anggaran dana desa pada tahun 2015.

Inovasi

Inovasi adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru pula. Dilihat sekilas, inovasi yang dimiliki oleh pengelola program ADD di Kecamatan Sungai Apit sebenarnya sudah ada, namun inovasi yang dilaksanakan masih setengah hati bahkan sering ragu untuk dilaksanakan. Sewaktu proses identifikasi awal permasalahan misalnya, inovasi ini sudah tampak, namun pada tahap pelaksanaan mereka masih terkesan takut untuk memberikan ide dan gagasan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Padahal pemecahan masalah yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan program ADD merupakan hak prerogatif pengelola program untuk menyelesaikannya.

Hal ini dikarenakan keterlibatan elit lokal yang tinggi, sehingga membuat setiap inovasi yang ditemukan harus terlebih dahulu didiskusikan dengan mereka. Ketidakberanian pengelola program ADD dalam melaksanakan inovasi yang dimilikinya disebabkan oleh ketakutan yang

tinggi akan kesalahan terhadap solusi yang ditemukan. Apalagi sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap inovasi yang akan diambil harus dibicarakan terlebih dahulu pada elit lokal untuk kemudian diambil keputusannya. Padahal asal dapat dipertanggungjawabkan, dana ADD tersebut dapat digunakan untuk apa saja yang diperlukan oleh masyarakat desa sesuai aturan-aturan yang ada. Mulai dari pendirian posyandu hingga gaji atau honor mu'azin atau gorim masjid bahkan diperbolehkan untuk digunakan.

Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Pemanfaatan ADD dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Paling tidak ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu indikator ekonomi, indikator keadilan sosial, dan indikator lingkungan hidup.

Dari indikator ekonomi mensyaratkan bahwa pembangunan yang dilakukan adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, yang dilakukan melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan. Setakat ini pembangunan yang menunjang untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan akses jalan desa ke areal pertanian dan perkebunan. Banyaknya pembukaan hutan untuk areal pertanian dan perkebunan sangat berdampak positif bagi perekonomian warga, namun secara tidak langsung juga mengurangi ketersediaan luas hutan yang seharusnya dilestarikan.

Untuk indikator keadilan sosial, pemanfaatan ADD sekilas nampak sudah berjalan cukup adil. Hal yang dijadikan patokan adil atau tidaknya adalah penggunaan RPJMDes dalam melaksanakan pembangunan. RPJMDes telah disusun sesuai dengan keinginan masyarakat dalam Musrenbang. Namun pembangunan yang dilakukan masih belum merata. Selain belum merata, pelaksanaan pembangunan juga kurang memperhatikan aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat, seperti membudayakan kegiatan gotong-royong.

Kepercayaan

Kepercayaan menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah program. Terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program ADD di Kecamatan Sungai Apit terlihat masih rendah. Hal ini lebih disebabkan karena pihak pelaksana sangat jarang melakukan sosialisasi atas program tersebut. Masyarakat menyebutkan hanya di awal-awal kegiatan saja sosialisasi dilakukan oleh pihak pelaksana dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai desa atau gedung pertemuan desa.

Model sosialisasi ini terkesan tidak efektif karena terkadang tidak semua masyarakat hadir untuk mendengarkan pemaparan program. Akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak menerima informasi terhadap pelaksanaan program ADD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Kegagalan dalam proses sosialisasi yang dilakukan akan membuat program ini hanya akan diikuti oleh segelintir masyarakat saja tanpa menyentuh keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, proses sosialisasi yang dilakukan harus berjalan, agar masyarakat keseluruhannya mengetahui program pemberdayaan yang dilaksanakan. Sebab ditakutkan akan muncul indikasi bahwa masyarakat pemanfaat program hanya itu-itu saja dan berasal dari masyarakat yang dekat dengan pusat informasi program.

Salah faktor yang tidak kalah penting dalam pemanfaatan ADD adalah soal akuntabilitas. Pemerintah desa terkait selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran kurang transparan dalam masalah keuangan. Hal tersebut tentu saja membuat ketidakjelasan mengenai penggunaan ADD yang diperuntukkan utama bagi pemberdayaan masyarakat. Akibatnya kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, karena itu mereka menyarankan kepada pihak kecamatan agar mencari pengelola yang amanah. Tujuannya agar segala aktifitas dan kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada kelompok sasaran.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap

pemanfaatan ADD belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Padahal setiap desa sesuai dengan aturan tentang laporan pertanggungjawaban kepala desa mewajibkan setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir tahun anggaran serta menginformasikan kepada rakyat yang meliputi informasi pokok-pokok kegiatan. Kondisi yang terjadi di lapangan masih ada sebagian pemerintah desa yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban tentang anggaran yang dikeluarkan dalam pemanfaatan ADD tersebut. Karena itu, ada dana ADD yang pernah dihentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap realisasi dari program.

Team Work

Team work (tim kerja) yang dibentuk dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah dibebankan dalam melaksanakan program ADD di Kecamatan Sungai Apit masih belum maksimal melakukan kerjanya. Ketidaksimalan ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman mereka terhadap pekerjaan yang diberikan. Akibatnya program yang dikerjakan belum dapat dikerjakan secara bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Rendahnya kerjasama yang ditunjukkan oleh pihak pemberdaya disebabkan oleh tingkat kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki juga masih rendah.

Dilihat dari segi pendidikan, rata-rata yang menjadi pihak pemberdaya adalah SMU/SMK. Realitas ini terkadang sering membuat pihak pemberdaya sulit menyatukan idenya agar bisa bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan. Dampaknya tim kerja yang dibentuk sulit melaksanakan strategi yang telah disusun untuk melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat. Padahal kerjasama yang dilakukan oleh tim kerja akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Karena pihak pemberdaya akan saling membantu dan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas pemberdayaan. Bahkan pihak

pemberdaya juga bisa memikirkan bersama apabila menemui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Dalam pemanfaatan ADD penting adanya kerjasama antara pengelola dan kelompok sasaran. Kerjasama ini terlihat dalam pemanfaatan langsung hasil pembangunan seperti pada pembangunan gedung sekolah, pengadaan air bersih, dan akses jalan desa. Salah satu hasil pembangunan yang telah dilakukan dari hasil kerjasama adalah saat membangun gedung TK. Bangunan yang dulu mengalami kerusakan akibat lama terbengkalai sudah diperbaiki warga secara gotong-royong dan swadaya. Sampai saat ini bangunan tersebut masih dalam kondisi baik dan bersih karena warga sering membersihkan tempat tersebut secara bergantian.

Komunikasi

Komunikasi menjadi hal penting dari tercapainya tujuan dalam organisasi. Komunikasi yang dikembangkan oleh pihak pelaksana dari program ADD di Kecamatan Sungai Apit masih belum berjalan dengan baik. Artinya pihak pemberdaya belum dapat memberikan informasi dan berita tentang pelaksanaan program yang jelas. Ketidakmampuan melakukan komunikasi membuat program belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Kurang maksimalnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan gejala kurang baik.

Proses komunikasi yang terpenting adalah menyampaikan informasi atau berita akan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Karena dengan adanya kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya akan memberikan pengetahuan masyarakat akan program pemberdayaan masyarakat diberikan oleh pemerintah daerah. Realita di lapangan yang ditemui bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat tentang program masih belum merata ke seluruh masyarakat. Akibatnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum dapat diterima merata informasinya oleh masyarakat.

Disinilah perlu dikemukakan apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Dalam pakteknya, partisipasi dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pada saat proses pembangunan dilaksanakan, dan pada pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui keikutsertaan dalam Musrenbang, pada Musrenbang masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LPMD, dan BPD akan dihadirkan dan dimintai pendapatnya mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun didapat data bahwa persentase kehadiran masyarakat dalam rapat ini masih rendah, yaitu hanya mencapai 57% dari peserta yang diundang hadir dalam rapat tersebut.

Untuk partisipasi masyarakat pada saat proses pembangunan memang dilakukan melalui melibatkan masyarakat sebagai anggota TPK ataupun sebagai pekerja proyek. Namun partisipasi masyarakat yang terjadi pada proses ini masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukan agar masyarakat sebagai subjek pembangunan terlibat dan dapat mengontrol langsung proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Masyarakat sepertinya sulit untuk diajak berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik sebagai anggota tim ataupun pekerja. Mereka beralasan bahwa upah yang diberikan sebagai pekerja proyek dalam pembangunan infrastruktur desa rendah, sehingga lebih memilih untuk melakukan pekerjaan di tempat lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan ADD Melalui Penguatan Kelembagaan

Sebagai sebuah kegiatan, pemberdayaan masyarakat tentunya mengalami kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk melihat tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peneliti mengadopsi teori Lowe (2005) yang mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan

masyarakat, yakni *fear*, *role of clarity*, dan *resistence of change*.

Takut Gagal

Ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan program ADD di Kecamatan Sungai Apit lebih dikarenakan rasa takut gagal dalam menjalankan program. Padahal program ini menjanjikan tujuan yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat desa melalui bantuan modal, terutama bagi kaum perempuan yang memiliki usaha kelompok atau kelompok usaha. Dimana upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal guna membantu mengembangkan ekonomi keluarganya. Namun tidak semua masyarakat tertarik untuk mengikuti program dan berperan serta dalam program bantuan modal ini.

Mindset yang berkembang di masyarakat adalah bila gagal dalam melaksanakan program, maka akan terbebani dengan hutang dari pinjaman modal. Rasa takut akan gagal bahkan sudah ada di saat mereka menyusun sebuah proposal pengajuan permohonan modal sesuai dengan syarat dan kriteria program yang ditetapkan. Apalagi jiwa kaum perempuan yang menjadi kelompok sasaran adalah kriteria jiwa yang labil dan sulit untuk mengambil keputusan yang mengandung resiko yang tinggi. Apabila kegagalan benar-benar terjadi maka rasa takut yang berikutnya akan muncul adalah takut menerima sanksi, akibat dari kegagalan yang dilakukan. Sebab sanksi yang diterima bukan hanya sanksi finansial, tetapi juga sanksi psikologis dari masyarakat yang gagal mengikuti program.

Kebanyakan tim pelaksana program ADD di Kecamatan Sungai Apit cenderung menggunakan metode dan tehnik yang sama untuk melaksanakan program bantuan modal. Bahkan di seluruh wilayah desa yang menerima program ADD di memiliki kriteria dan persyaratan yang sama bagi siapa saja masyarakat untuk mengikuti program. Fakta ini menjelaskan bahwa pihak pengelola program ADD memang kurang melakukan observasi dan pengumpulan data guna mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi

lokalnya, terutama dalam menetapkan jenis usaha yang akan menerima bantuan modal usaha. Padahal setiap desa penerima program ADD memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, keadaan domografi yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda, tentunya membuat penetapan usaha yang dilakukan juga berbeda-beda.

Ketidakjelasan Program

Masyarakat desa di Kecamatan Sungai Apit sering merasa sangat kurang nyaman dengan penetapan kriteria usaha yang bisa menerima bantuan modal melalui program ADD. Sebab ternyata tidak semua masyarakat menggeluti usaha ekonominya yang sesuai dengan kriteria usaha yang sudah ditetapkan oleh program ADD. Untuk memperoleh bantuan modal itu, masyarakat tentu harus mengikuti kriteria usaha yang telah ditetapkan, sebab apabila tidak mengikutinya maka tidak akan mendapatkan modal tersebut. Kondisi ini membuat banyak masyarakat, khususnya kaum perempuan yang kurang bisa mengikuti program ADD, karena tidak sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditetapkan tadi.

Kenyataan ini membuktikan bahwa pihak pengelola program ADD kurang mengenali dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bisa saja disebabkan oleh kurangnya observasi dan pencarian data dari pengelola akan usaha pengembangan ekonomi yang disukai masyarakat. Hal ini tentu saja berdampak kepada ketidakyamanan masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan. Ketidakyamanan juga dirasakan masyarakat ketika mereka harus melakoni pekerjaan yang baru dengan merubah pekerjaan yang lama, hanya karena ingin memperoleh program saja.

Akibat dari ketidakjelasan dari pihak pelaksana program ini ditemukan masih banyak kriteria usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa belum terakomodir untuk bisa menerima bantuan modal. Dampaknya adalah masyarakat desa yang seharusnya layak menerima bantuan modal dalam mengembangkan ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan

dikarenakan persyaratan dan kriteria yang tidak terpenuhi.

Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa tata kelola ADD di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih nampak belum efektif. Hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa. Partisipasi masyarakat juga rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD melalui penguatan kelembagaan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program ADD ini dalam bentuk bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan belum termanfaatkan dengan baik. Akibatnya sebagian besar dana yang tersedia untuk bantuan modal usaha dalam upaya mengembangkan potensi dan ekonomi masyarakat terpaksa dialihkan kepada program pembangunan infrastruktur desa. Faktor yang dominan mempengaruhi adalah takut gagal dan ketidakjelasan program. Dimana ketidakmampuan masyarakat desa, khususnya kaum perempuan untuk mengikuti program ADD yang memberikan bantuan modal usaha disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dari masyarakat desa. Rasa takut yang ditimbulkan meliputi ketakutan akan kegagalan dalam mengikuti program, ditambah lagi pihak pengelola program ADD kurang mengenali dan mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat.

REFERENSI

Effendi, Crisna. 2009. *“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”*. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret

Johnson, Ron and David Redmod., 1992., *The*

Art of Empowerment, The Profit and Pain of Employee Involvement., Financial Times., Pitman Publishing., Great Britain.

Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3

Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Nugrianti, Oni dan Zulkarnaini. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 4, No. 1

Paulus Wirutomo dkk., 2003., *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah.*, Jakarta: Penerbit Cipruy.

Pranarka dan Onny S. Prijono., 1996., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi.*, Jakarta: CSIS.

Riyadi dan Deddy., 2005., *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rohmah, Kulia Tatik. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Jurnal Kajian Otonomi Daerah*. Vol. 01, No. 01.

Soetomo., 2011., *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujianto, dkk., 2016. Kajian Model Pengelolaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu. Pekanbaru: LPPM Universitas Riau dan Balitbang Provinsi Riau.

Sugiyono., 2006., *Metodologi Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman., 2005., *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.*, Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Syarif., Maryadi, 2013., Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam., *Jurnal Media Akademika*, Vol. 28, No. 3.

Usman, Sunyoto. 2004., *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasistiono, Sadu., 2007., *Prospek Pengembangan Desa.*, Bandung: Fokusmedia.,

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwijowijoto., 2007., *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.*, Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.